



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA  
KERJA KOTA SINGKAWANG**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123

Telp. (0562) 639923 Fax. (0562) 639093

E-mail : [pmnaker@singkawangkota.go.id](mailto:pmnaker@singkawangkota.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah, SWT, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan merupakan dokumen perencanaan yang membuat rencana tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 yang mana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Disamping itu Rencana Kerja ini berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen turunannya dan pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024.

Singkawang,

2023

**Kepala Dinas,**

**YASMALIZAR, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681016 199803 1 004



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....</b>	<b>18</b>
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	18
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD .....	28
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD .....	31
2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	33
2.5 PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	40
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD .....</b>	<b>41</b>
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	41
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD .....	42
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	43
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Singkawang, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026, serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk tahun pertama masa periode Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang tahun 2024. Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja, pengorganisasian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Renstra (Rencana Strategis), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Dearah. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- d. Perumusan Rancangan Akhir
- e. Penetapan



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);



22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 110);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 2);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan



daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk tahun 2024.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Sebagai jembatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Rancana Kerja Pembangunan Daerah ke Rencana Kerja Anggaran.
- b. Pengakomodiran Perencanaan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.
- c. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan penyajian sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancanganRenja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja



Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (*tentang Capaian Indikator Program dan Kegiatan*)**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD



tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan



6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel dengan format sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun .... (tahun berjalan)\*  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah : .....

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun .....	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1										
1 01	Unsur .....									
1 01 01	Bidang Unsur .....									
1 01 01 01	Program .....									
1 01 01 01	Kegiatan .....									
1 01 01 02	Kegiatan .....									
1 01 01 03	Dst.....									
1 01 02	Program .....									
1 01 02 01	Kegiatan .....									
1 01 02 02	Kegiatan .....									
1 01 02 03	Dst .....									
1 01 03	Program .....									
1 01 03 01	Kegiatan .....									
1 01 03 02	Kegiatan .....									
1 01 03 03	Dst .....									

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (tentang Capaian Indikator Sasaran)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana



cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (thn n)	Tahun .... (thn n+1)	Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (thn n)	Tahun .... (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (hasil analisis dari sub bab sebelumnya)**

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian



dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di



rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

4. Lampirkan tabel berikut.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:



1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...

Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah : .....

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan



dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :

- ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- ✓ Pencapaian SDGs,
- ✓ Pengentasan kemiskinan,
- ✓ Pencapaian NSPK dan SPM,
- ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- ✓ Pengembangan daerah terisolir,
- ✓ Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun .....  
dan Prakiraan Maju Tahun.....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
Nama Perangkat Daerah : .....  
lembar ..... dari .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun ..... (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun .....	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dokumen Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan. Dalam Dokumen Rencana Kerja tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana awal yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program dan kegiatan serta sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu serta peningkatan di bidang tenaga kerja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya Pemerintah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung



tombak daam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kota Singkawang, sehingga terwujud komitmen Pemerintah Kota Singkawang dlaam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

Sebagai komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerjanya untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah, serta pada masa akhir tahun dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT), oleh sebabnya LKT juga dapat dijadikan sebagai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan realisasi Renstra Perangkat Daerah tahun lalu.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026, disajikan dalam tabel di bawah ini.



**Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023  
Kota Singkawang**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA PD 2023	Realisasi RENJA PD 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.07.2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>									
2.07.2.18.2.07.002	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja (%)	100%	79,27%	100%	79,27%	79,27%	20%	99,27%	99,27%
2.07.2.18.2.07.002.2.01.02	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	100%
2.07.2.18.2.07.002.2.01.02.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)	0	0	0	0	0	5	5	0
2.07.2.18.2.07.003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TEANGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Berkompetensi (%)	50%	86,70%	50%	86,70%	173,4%	56,25%	229,65%	459



2.07.2.18.2.07 003.2.01.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (%)	28,57%	86,70%	28,57%	86,70%	303,47%	2 Unit		
2.07.2.18.2.07 003.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (orang)	16	16	16	16	100%	32	62	4%
2.07.2.18.2.07 003.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	0	1	0	0	1	1	100%
2.07.2.18.2.07 004	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja (%)</b>	<b>19,7%</b>	<b>0,92%</b>	<b>19,7%</b>	<b>0,92%</b>	<b>4,67%</b>	<b>62,50%</b>	<b>64,34%</b>	<b>3,27%</b>
2.07.2.18.2.07 004.2.01	<b>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja (Pelayanan)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
2.07.2.18.2.07 004.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui AKAD dan AKL (orang)	5	0	5	0	0	60	60	1200%
2.07.2.18.2.07 004.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (orang)	0	0	500	0	0	0	0	0
2.07.2.18.2.07 004.2.03	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Informasi Pasar Kerja (Lowongan Kerja)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
2.07.2.18.2.07 004.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (orang)	20	0	20	0	0	5	5	25%
2.07.2.18.2.07 004.2.04	<b>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMI yang melapor (%)</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 Orang</b>	<b>23 Orang</b>	
2.07.2.18.2.07 004.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Yang Melaporkan Diri (Orang)	15	0	15	0	0	23	23	153,33%
2.07.2.18.2.07. 005	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan (%)</b>	<b>18%</b>	<b>2,46%</b>	<b>18%</b>	<b>2,46%</b>	<b>13,67%</b>	<b>58,21%</b>	<b>63,13%</b>	<b>350,72%</b>



2.07.2.18.2.07.005.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan Yang Disyahkan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Didaftarkan (%)	18%	41,80%	18%	41,80%		58,21%	141,81%	787,83%
2.07.2.18.2.07.005.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upa dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	100%
2.07.2.18.2.07.005.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	10%	14,37%	10%	14,37%	14,37%	100%	128,74%	1.287,4%
2.07.2.18.2.07.005.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	4	0	4	0	0	3	3	75%
2.07.2.18.2.07.005.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	8	0	8	0	0	2	2	25%
2.07.2.18.2.07.005.2.02.03	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	0	1	0	0	1	1	100%
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
<b>2.18.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	34,79%	100%	34,79%	34,79%	100%	169,58%	169,58%



	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	2	0	0	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD(Dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	2	0	2	0	0	2	2	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>43,31%</b>	<b>100%</b>	<b>43,31%</b>	<b>43,31</b>	<b>100%</b>	<b>186,62%</b>	<b>186,62%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)								
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan(Dokumen)	1	1	1	1	100%	2	4	400%



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (laporan)	2	0	2	0	0	2	2	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>87,24%</b>	<b>100%</b>	<b>87,24</b>	<b>87,24</b>	<b>100%</b>	<b>274,48%</b>	<b>274,48%</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>25,08%</b>	<b>100%</b>	<b>25,08%</b>	<b>25,08%</b>	<b>100%</b>	<b>150,16%</b>	<b>150,16%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	0	4	0	0	4	4	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	4	1	25%	4	6	150%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	1	4	1	25%	4	6	150%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1	2	1	50%	2	4	200%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	10	20	10	50%	25	45	225%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>99,96%</b>	<b>100%</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,6%</b>	<b>100%</b>	<b>299,2%</b>	<b>299,2%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	6	6	6	100%	2	14	350%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>45,63%</b>	<b>100%</b>	<b>45,63%</b>	<b>45,63%</b>	<b>100%</b>	<b>191,26%</b>	<b>191,26%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0	1	0	0	1	1	<b>100%</b>



	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6	12	6	50%	12	24	200%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	6	12	6	50%	8	20	250%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>53,22%</b>	<b>100%</b>	<b>53,22%</b>	<b>53,22%</b>	<b>100%</b>	<b>116,44%</b>	<b>116,44</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	8	10	8	80%	11	27	245,45%
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) di Kota Singkawang (%)</b>	<b>10%</b>	<b>-180,80%</b>	<b>4%</b>	<b>1,01%</b>	<b>25,25%</b>	<b>58,19%</b>	<b>59,2%</b>	<b>592%</b>
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	0	1	0	0	0	0	0%
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat ( Dokumen)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33,33%</b>
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota (Dokumen)	2	0	2	0	0	1	1	50%
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Promosi Penanaman Modal (%)</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,83%</b>	<b>19 Investor</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,83%</b>
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Kali)</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,83%</b>	<b>19 Investor</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,83%</b>



	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	1	0	1	0	0	1	1	100%
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)</b>	<b>91,55%</b>	<b>4,72%</b>	<b>91,55%</b>	<b>4,72%</b>	<b>5,16%</b>	<b>88%</b>	<b>97,44%</b>	<b>106,43%</b>
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Perizinan dan Non Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan (%)</b>	<b>99,50%</b>	<b>4,72%</b>	<b>99,50%</b>	<b>4,72%</b>	<b>4,74%</b>	<b>99,90%</b>	<b>109,34%</b>	<b>109,89%</b>
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2000	0	2000			1600		
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	1000		1000			800		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (orang)	10		10			8		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kemajuan Penanaman Modal) (%)</b>	<b>100%</b>	<b>28,74%</b>	<b>43%</b>	<b>28,74%</b>	<b>66,83%</b>	<b>23%</b>	<b>80,48%</b>	<b>80,48%</b>
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM (Perusahaan)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>		<b>90</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	200	31,73%	200	31,73%		360		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	15	7,89%	15	7,89%		14		



	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan Sistem Penanaman Modal (%)	100%	60,27%	100%	60,27%	60,27%	100%	220,54%	220,54
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal (Dokumen)</b>	1	0	1	0	0	1	1	100%
2.18.6.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	100%



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, belum dapat disimpulkan, mengingat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan masih dalam proses berjalan dan merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang ditetapkan untuk secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, bahwa sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sekaligus menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja adalah “Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan”.



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja. Dan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Atas dasar tugas dan fungsi maka indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dalam empat tahun mendatang, dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud, dapat diidentifikasi sebagaimana tabel di bawah ini :



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja**  
**Kota Singkawang Tahun 2023-2026**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Capaian Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10			-12	-12	-14
1	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Singkawang. (Orang)	8.000	8.500	9.000	9.500	0	0	0	0	0	Belum dapat dianalisis capaian realisasinya, karena kinerja pelayanan dinas dalam proses berjalan, dan merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra DPMTK Th. 2023-2026
2	Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di daerah	-	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rupiah)	57,33	58,19	59,05	59,93	0	0	0	0	0	



Jika dilihat tabel di atas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, belum dapat dianalisis mengingat proses pelaksanaan masih belum selesai dan merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

### **2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**

Isu-isu selalu berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi suatu institusi, baik lingkup internal maupun eksternal. Isu-isu strategis dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu perlu disikapi dan dikaji untuk keberlangsungan penyelenggaraan roda organisasi.

#### **Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Turunnya daya saing dan investasi daerah;
- 2) Meningkatnya pengangguran terbuka dan kemiskinan;

Berdasarkan beberapa isu strategis di atas dari tingkatan provinsi dan daerah, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :



Tabel 2.3

**Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya**

No	Isu Strategis Daerah (RPD)	Isu Strategis Dinas	Rencana Penanganan
1	2	3	4
1	Turunnya daya saing dan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>• Promosi Penanaman Modal</li><li>• Pelayanan Penanaman Modal</li><li>• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li><li>• Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li></ul>
2	Meningkatnya pengangguran terbuka dan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sedikitnya lapangan kerja</li><li>• Rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor</li><li>• Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan tenaga kerja</li><li>• Penempatan Tenaga Kerja</li><li>• Hubungan Industrial</li><li>• Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li></ul>

Dari isu strategis seperti yang termuat dalam tabel di atas, rencana penanganannya akan ditindaklanjuti ke dalam program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) bidang urusan dan 9 (sembilan) program Prioritas selama masa Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal, dengan program :
  - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - 2) Program Promosi Penanaman Modal
  - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
  - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Urusan Tenaga Kerja, dengan program :
  - 1) Perencanaan tenaga kerja
  - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
  - 3) Program Hubungan Industrial
  - 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2024, namun RKPD Tahun 2024 *belum ada* sehingga Renja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang disusun berdasarkan kebutuhan anggaran yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dapat disajikan sebagai berikut dalam Tabel. T-C.31.



**Tabel T-C.31.**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KOTA SINGKAWANG**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan (Dalam RKPD)		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Renja)	
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA</b>					<b>8.055.093.824,00</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>8.055.093.824,00</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					<b>345.127.274,00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja</b>			<b>20 %</b>	<b>30.000.000,00</b>
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)			1 Dokumen	30.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro			5 Orang	30.000.000,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Besaran Pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi</b>			<b>56.25 %</b>	<b>190.099.842,00</b>
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Unit Kompetensi Yang Dilaksanakan Pelatihannya			2 unit/Kejuruan	175.099.842,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			32 Orang	170.000.000,00
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			1 Lembaga	5.099.842,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina			20 %	15.000.000,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			5 Lembaga	15.000.000,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja</b>			<b>62.50 %</b>	<b>25.027.432,00</b>
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			1 Pelayanan	5.027.432,00



				Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			60 Orang	5.027.432,00
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			0 Orang	0,00
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja (Lowongan Kerja)			1 Lowongan Kerja	13.900.000,00
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			5 Orang	13.900.000,00
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang difasilitasi			23 Orang	6.100.000,00
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani			23 Orang	6.100.000,00
<b>4</b>				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang telah memenuhi sarana Hubunagn Industrial</b>			<b>58.21 %</b>	<b>100.000.000,00</b>
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan			19.85 %	31.000.000,00
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			96 Perusahaan	12.000.000,00
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			8 Perusahaan	5.000.000,00
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			1 Laporan	14.000.000,00
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			100 %	69.000.000,00
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			3 Perkara	10.000.000,00
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			2 Perkara	12.500.000,00



			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			1 dan 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			1 Lembaga	16.500.000,00
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			60 Orang	15.000.000,00
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								<b>7.709.966.550,00</b>
<b>5</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100 %</b>	<b>6.005.928.185,00</b>
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	50.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	10.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	5.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	5.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	5.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	5.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	5.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	15.000.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan			100 %	4.863.868.185,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	4.689.447.585,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4 Dokumen	152.820.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	5.000.000,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	6.600.000,00



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	10.000.000,00
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	5.000.000,00
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	5.000.000,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	21.950.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	21.950.000,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	283.400.000,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	22.000.000,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	22.000.000,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	22.500.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	1.900.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	215.000.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	20.000.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	20.000.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	707.601.000,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	2.601.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	233.000.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			8 Laporan	472.000.000,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	54.109.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	41.109.000,00



				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			11 Unit	13.000.000,00
<b>6</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>			<b>58.19 %</b>	<b>135.000.000,00</b>
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat			1 Dokumen	135.000.000,00
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1 Dokumen	135.000.000,00
<b>7</b>				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Bertambahnya Investor baru di Kota Singkawang</b>			<b>19 Investor</b>	<b>5.235.283,00</b>
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan			1 Kali	5.235.283,00
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 Dokumen	5.235.283,00
<b>8</b>				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan</b>			<b>88 %</b>	<b>1.162.214.417,00</b>
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Nonperizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan			99.90 %	1.162.214.417,00
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			1600 Pelaku Usaha	1.041.214.417,00
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			8 Pelaku Usaha	11.000.000,00
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			800 Kegiatan Usaha	110.000.000,00
<b>9</b>				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Besaran perusahaan yang patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)</b>			<b>23 %</b>	<b>392.513.665,00</b>
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM			90 Perusahaan	392.513.665,00
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			360 Pelaku Usaha	346.000.000,00



				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			14 Kegiatan Usaha	46.513.665,00
<b>10</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>			<b>100 %</b>	<b>9.075.000,00</b>
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal			1 Dokumen	9.075.000,00
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			1 Dokumen	9.075.000,00
									<b>8.055.093.824,00</b>



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024, selanjutnya akan didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Singkawang. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan RENJA dengan kesepakatan hasil musrenbang Kota. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dan semuanya diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI.

Adapun Usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk di Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, untuk sementara belum ada.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, lebih kepada masalah ketenagakerjaan dan penanaman modal. Ada 2 (dua) urusan urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yaitu :

1. Urusan Tenaga Kerja yang terdiri dari program :
  - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Urusan Penanaman Modal, dengan program yaitu :
  - a. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal
  - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai Lampiran SE Mendagri Nomor 120/313/Otda Tanggal 24 Januari 2011, untuk **program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dan **program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasi**, merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh daerah.

Selanjutnya untuk Renja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan bagian pelaksanaan tahunan yang pertama dari Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 – 2-26 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 90 Tahun 2019, oleh karena itu nomenklatur program/ kegiatan juga ikut mengalami penyesuaian sebagaimana dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, bahwa sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sekaligus menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja adalah “Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan”.

Untuk mewujudkan tujuan *di atas* maka ditetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dinas sebagai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang
2. Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di daerah

Berdasarkan keterkaitan tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator dan targetnya yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023-2026 sebagaimana dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			8,16%	8,00%	7,50%	7,16%
			<b>Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang</b>	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Singkawang. (Orang)	8.000	8.500	9.000	9.500
			<b>Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang</b>	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rupiah)	57,33	58,19	59,05	59,93

Selanjutnya tujuan dan sasaran tersebut, dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Renja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang ke dalam bentuk program dan kegiatan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran yang akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk dilaksanakan.

### 3.3 Program Dan Kegiatan.

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa terhitung mulai tahun 2023 seluruh program dan kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019, ada 10 (sepuluh) **program prioritas dalam rangka mendukung sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**, untuk dapat mendukung pencapaian Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah :

Sasaran Strategis “**Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang**” terdiri dari program :



**1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**

Dengan kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

**2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.**

Dengan kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
- b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA.**

Program ini dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- d) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

**4) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.**

Dengan kegiatan, yaitu :

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategis selanjutnya yaitu “**Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**” terdiri dari program :

**1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.**

Program ini ditunjang dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :



- a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

**2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.**

Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

**3) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.**

Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

**4) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.**

Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

**5) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.**

Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Total dari kebutuhan dana untuk pelaksanaan 9 (Sembilan) program dan 13 (tiga belas) kegiatan strategis di Tahun 2024, yang sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, disepakati sebesar Rp. 2.058.138.207,- (Dua Milyar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah). Adapun nilai tiap dari sumber pendanaan untuk program/ kegiatan/ sub kegiatan strategis dapat dilihat pada tabel T-C.33 di bawah ini :



**Tabel T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

No	Usuran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting (Bagian Pelaksanaan)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Targat Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>345.127.274</b>				<b>364.937.688</b>
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja</b>		<b>20%</b>	<b>30.000.000</b>			<b>40%</b>	<b>35.000.000</b>
	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>30.000.000</b>		<b>NAKER</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>
	<b>Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro (orang)</b>		<b>5 Orang</b>	<b>30.000.000</b>			<b>5 Orang</b>	<b>35.000.000</b>
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Besaran Pencari Kerja yang Dilatih Lulus Uji Kompetensi</b>		<b>56,25%</b>	<b>190.099.842</b>			<b>62,50%</b>	<b>190.285.777</b>
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Unit Kompetensi yang Dilaksanakan Pelatihannya</b>		<b>2 Unit/Kejuruan</b>	<b>175.099.842</b>		<b>UPT. LLK</b>	<b>2 Unit/Kejuruan</b>	<b>175.285.777</b>
	<b>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</b>	<b>SKW</b>	<b>32 Orang</b>	<b>170.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>32 Orang</b>	<b>170.185.777</b>
	<b>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasar</b>	<b>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</b>		<b>1 Lembaga</b>	<b>5.099.842</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Lembaga</b>	<b>5.100.000</b>



		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		20%	15.000.000		LLK	24%	15.000.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		5 Lembaga	15.000.000			6 Lembaga	15.000.000
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (%)</b>		<b>40%</b>	<b>34.000.000</b>			<b>50%</b>	<b>214.060.000</b>
		<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>SKW</b>	<b>1 Pelayanan</b>	<b>5.027.432</b>	<b>APBD</b>	<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>1 Pelayanan</b>	<b>5.051.911</b>
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		60 Orang	5.027.432			60 Orang	5.027.432
		Perluasan Kesempatan Kerja			0	-				
		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Informasi Pasar Kerja (Lowongan Kerja)</b>		<b>1 Lowongan</b>	<b>13.900.000</b>		<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>1 Lowongan</b>	<b>13.900.000</b>
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja		5 Orang	13.900.000	APBD		8 Orang	13.900.000
		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI yang Difasilitasi</b>		<b>23 Orang</b>	<b>6.100.000</b>		<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>24 PMI</b>	<b>6.100.000</b>
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		23 Orang	6.100.000	APBD		24 Orang	6.100.000
		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Telah Memenuhi Sarana Hubungan Industrial</b>		<b>58,21%</b>	<b>100.000.000</b>			<b>59,16%</b>	<b>114.600.000</b>
		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan</b>	<b>SKW</b>	<b>19,85%</b>	<b>31.000.000</b>		<b>Bid. Hubungan Industrial Dan Naker</b>	<b>21,76%</b>	<b>34.000.000</b>



			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan		96 Perusahaan	12.000.000	APBD		105 Perusahaan	13.000.000
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		8 Perusahaan	5.000.000	APBD		9 Perusahaan	6.000.000
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 Laporan	14.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)</b>		<b>100%</b>	<b>69.000.000</b>		<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>100%</b>	<b>80.600.000</b>
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	SKW	3 Perkara	10.000.000	APBD		2 Perkara	11.000.000
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	SKW	2 Perkara	12.500.000	APBD		2 Perkara	14.000.000
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	SKW	1 dari 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000	APBD		1 dari 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.500.000
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit (Laporan)	SKW	1	15.904.610	APBD		1	24.500.000



<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						<b>Rp. 1.704.038.365</b>				<b>Rp. 1.713.612.194</b>
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>			<b>58,19%</b>	<b>135.000.000</b>			<b>13%</b>	<b>140.000.000</b>
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (Dokumen)</b>			<b>7 Dokumen</b>	<b>135.000.000</b>		<b>Bid. Penanaman Modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>140.000.000</b>
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	SKW		1 Dokumen	135.000.000	APBD		1 Dokumen	140.000.000
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Bertambahnya Investor Baru di Kota Singkawang</b>			<b>19 Investor</b>	<b>5.235.283</b>			<b>20 Investor</b>	<b>5.238.447</b>
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Diselenggarakan</b>			<b>1 Kali</b>	<b>5.235.283</b>		<b>Bid. Penanaman Modal</b>	<b>1 Kali</b>	<b>5.235.283</b>
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	SKW		1 Dokumen	5.235.283	APBD		1 Dokumen	5.235.238
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)</b>			<b>88%</b>	<b>1.162.214.417</b>			<b>89</b>	<b>1.163.351.168</b>
	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Perizinan dan Non Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan (%)</b>			<b>99,90%</b>	<b>1.162.214.417</b>		<b>Bid. Peningkatan Layanan Dan Pengaduan, Dan Bid. Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>1.163.351.168</b>
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	SKW		1600 Pelaku Usaha	1.041.214.417	APBD	<b>Bid. Peningkatan Layanan Dan Pengaduan</b>	1700 Pelakuk Usaha	1.041.468.000



			Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di idang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten / Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	SKW	800 Kegiatan Usaha	110.000.000	APBD	Bid. Perizinan Dan Non Perizinan	850 Kegiatan Usaha	110.500.000
			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	SKW	8 Pelaku Usaha	11.000.000	APBD	Bid. Peningkatan Layanan Dan Pengaduan	11 Pelaku Usaha	11.363.168
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Besaran Perusahaan yang Patuh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>		<b>23%</b>	<b>392.513.665</b>			<b>24%</b>	<b>392.897.579</b>
			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM</b>		<b>90 Perusahaan</b>	<b>392.513.665</b>			<b>95 Perusahaan</b>	<b>392.897.579</b>
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	SKW	360 Pelaku Usaha	346.000.000	DAU		360 Pelaku Usaha	346.200.000
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	SKW	14 Kegiatan Usaha	46.513.665	DAU		15 Kegiatan Usaha	46.697.579
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>100%</b>	<b>9.075.000</b>			<b>100%</b>	<b>12.125.000</b>
			<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>9.075.000</b>		<b>Bid. Penanaman Modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>12.125.000</b>



---

			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	SKW	1 Dokumen	9.075.000	APBD		1 Dokumen	12.125.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>2.058.138.207</b>				<b>2.267.557.971</b>



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam Tabel T-C.34 di bawah ini terdiri dari seluruh program/ kegiatan perangkat daerah, baik itu program dan kegiatan prioritas maupun program dan kegiatan rutin Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023 - 2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.

Adapun sebanyak 9 (Sembilan) program prioritas dengan 14 (empat belas) kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di Tahun Anggaran 2024 sebagaimana disampaikan pada BAB III, masih ada 1 (satu) program yang merupakan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, yaitu :

#### **1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.**

Program ini ditunjang dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

- a) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Administrasi Keuangan
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan ada 10 (sepuluh) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2024, dengan rincian plafon anggaran SKPD sebesar **Rp. 8.055.093.824,-** dan dari pagu indikatif tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja diprediksi ada menampung Dana DAK Non Fisik Bidang Penanaman Modal sebesar **Rp. 392.513.665,-**. sisanya bersumber dari dana APBD Kota Singkawang T.A 2024. Adapun rincian rumusan rencana program dan kegiatannya terlihat dalam Tabel T-C.34 di bawah ini :



**Tabel T-C.34**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting (Bagian Pelaksanaan)	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>345.127.274</b>				<b>364.937.688</b>
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja		20%	30.000.000			40%	35.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja		1 Dokumen	30.000.000		NAKER	100%	35.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro (orang)		5 Orang	30.000.000			5 Orang	35.000.000
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Besaran Pencari Kerja yang Dilatih Lulus Uji Kompetensi		56,25%	190.099.842			62,50%	190.285.777
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Unit Kompetensi yang Dilaksanakan Pelatihnannya		2 Unit/Kejuruan	175.099.842		UPT. LLK	2 Unit/Kejuruan	175.285.777
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	SKW	32 Orang	170.000.000	APBD		32 Orang	170.185.777



		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		1 Lembaga	5.099.842	APBD		1 Lembaga	5.100.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		20%	15.000.000		LLK	24%	15.000.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		5 Lembaga	15.000.000			6 Lembaga	15.000.000
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (%)</b>		<b>40%</b>	<b>34.000.000</b>			<b>50%</b>	<b>214.060.000</b>
		<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>SKW</b>	<b>1 Pelayanan</b>	<b>5.027.432</b>	<b>APBD</b>	<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>1 Pelayanan</b>	<b>5.051.911</b>
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		60 Orang	5.027.432			60 Orang	5.027.432
		Perluasan Kesempatan Kerja			0	-				
		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Informasi Pasar Kerja (Lowongan Kerja)</b>		<b>1 Lowongan</b>	<b>13.900.000</b>		<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>1 Lowongan</b>	<b>13.900.000</b>
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja		5 Orang	13.900.000	APBD		8 Orang	13.900.000
		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI yang Difasilitasi</b>		<b>23 Orang</b>	<b>6.100.000</b>		<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>24 PMI</b>	<b>6.100.000</b>
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		23 Orang	6.100.000	APBD		24 Orang	6.100.000



		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Telah Memenuhi Sarana Hubungan Industrial</b>		<b>58,21%</b>	<b>100.000.000</b>			<b>59,16%</b>	<b>114.600.000</b>
		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan</b>	<b>SKW</b>	<b>19,85%</b>	<b>31.000.000</b>		<b>Bid. Hubungan Industrial Dan Naker</b>	<b>21,76%</b>	<b>34.000.000</b>
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan		96 Perusahaan	12.000.000	APBD		105 Perusahaan	13.000.000
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		8 Perusahaan	5.000.000	APBD		9 Perusahaan	6.000.000
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 Laporan	14.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000
		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)</b>		<b>100%</b>	<b>69.000.000</b>		<b>Bid. Naker Dan Hubungan Industrial</b>	<b>100%</b>	<b>80.600.000</b>
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	SKW	3 Perkara	10.000.000	APBD		2 Perkara	11.000.000
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	SKW	2 Perkara	12.500.000	APBD		2 Perkara	14.000.000



		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	SKW	1 dari 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000	APBD		1 dari 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.500.000
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit (Laporan)	SKW	1	15.904.610	APBD		1	24.500.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						<b>Rp. 1.704.038.365</b>				<b>Rp. 1.713.612.194</b>
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>		<b>58,19%</b>	<b>135.000.000</b>			<b>13%</b>	<b>140.000.000</b>
		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (Dokumen)</b>		<b>7 Dokumen</b>	<b>135.000.000</b>		<b>Bid. Penanaman Modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>140.000.000</b>
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	SKW	1 Dokumen	135.000.000	APBD		1 Dokumen	140.000.000
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Bertambahnya Investor Baru di Kota Singkawang</b>		<b>19 Investor</b>	<b>5.235.283</b>			<b>20 Investor</b>	<b>5.238.447</b>
		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Diselenggarakan</b>		<b>1 Kali</b>	<b>5.235.283</b>		<b>Bid. Penanaman Modal</b>	<b>1 Kali</b>	<b>5.235.283</b>
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	SKW	1 Dokumen	5.235.283	APBD		1 Dokumen	5.235.238
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)</b>		<b>88%</b>	<b>1.162.214.417</b>			<b>89</b>	<b>1.163.351.168</b>



		<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Perizinan dan Non Perizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan (%)</b>		<b>99,90%</b>	<b>1.162.214.417</b>		Bid. Peningkatan Layanan Dan Pengaduan, Dan Bid. Perizinan Dan Non Perizinan	<b>100%</b>	<b>1.163.351.168</b>
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	SKW	1600 Pelaku Usaha	1.041.214.417	APBD	Bid. Peningkatan Layanan Dan Pengaduan	1700 Pelakuk Usaha	1.041.468.000
		Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di idang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten / Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	SKW	800 Kegiatan Usaha	110.000.000	APBD	Bid. Perizinan Dan Non Perizinan	850 Kegiatan Usaha	110.500.000
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	SKW	8 Pelaku Usaha	11.000.000	APBD	Bid. Peningkatan Layanan Dan Pengaduan	11 Pelaku Usaha	11.363.168
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Besaran Perusahaan yang Patuh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>		<b>23%</b>	<b>392.513.665</b>			<b>24%</b>	<b>392.897.579</b>
		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM</b>		<b>90 Perusahaan</b>	<b>392.513.665</b>			<b>95 Perusahaan</b>	<b>392.897.579</b>



		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	SKW	360 Pelaku Usaha	346.000.000	DAU		360 Pelaku Usaha	346.200.000
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	SKW	14 Kegiatan Usaha	46.513.665	DAU		15 Kegiatan Usaha	46.697.579
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>100%</b>	<b>9.075.000</b>			<b>100%</b>	<b>12.125.000</b>
		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>9.075.000</b>		<b>Bid. Penanaman Modal</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>12.125.000</b>
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	SKW	1 Dokumen	9.075.000	APBD		1 Dokumen	12.125.000
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>6.005.928.185</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>6.021.635.170</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>		<b>Bid. PEKK</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKW	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000



			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	SKW	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	SKW	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	SKW	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	SKW	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	SKW	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKW	2 Laporan	15.000.000	APBD		2 Laporan	15.000.000
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan</b>	<b>SKW</b>	<b>100%</b>	<b>4.863.868.185</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>4.894.610.170</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SKW	37 Orang/ Bulan	4.689.447.585	APBD		37 Orang/ Bulan	4.712.894.822
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SKW	4 Dokumen	152.820.600	APBD		4 Dokumen	159.850.348
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKW	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000



			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	SKW	2 Dokumen	6.600.000	APBD		1 Dokumen	6.865.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKW	2 Laporan	10.000.000	APBD		2 Laporan	10.000.000
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKW	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>21.950.000</b>			<b>100%</b>	<b>0</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SKW	1 Paket	21.950.000	APBD		0 Paket	0
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>283.400.000</b>			<b>100%</b>	<b>289.300.000</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SKW	4 Paket	22.000.000	APBD		4 Paket	22.500.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SKW	4 Paket	22.000.000	APBD		4 Paket	22.300.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SKW	4 Paket	22.500.000	APBD		4 Paket	22.600.000



		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang Disediakan	SKW	2 Dokumen	1.900.000	APBD		2 Dokumen	1.900.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKW	25 Laporan	215.000.000	APBD		30 Laporan	220.000.000
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SKW	2 Unit	20.000.000	APBD		2 Unit	15.000.000
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>707.601.000</b>			<b>100%</b>	<b>710.605.000</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKW	1 Laporan	2.601.000	APBD		1 Laporan	2.605.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	SKW	12 Laporan	233.000.000	APBD		12 Laporan	235.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	SKW	8 Laporan	472.000.000	APBD		8 Laporan	473.000.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>54.109.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>57.120.000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	SKW	1 Unit	41.109.000	APBD		1 Unit	42.620.000



---

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SKW	11 Unit	13.000.000	APBD		12 Unit	14.500.000
<b>JUMLAH</b>							<b>Rp. 8.055.093.824</b>				<b>Rp. 8.100.185.052</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan demikian ada keselarasan antara setiap dokumen perencanaan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Revisi Renstra Tahun 2023 - 2026.

Keberhasilan pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024, diharapkan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berkewajiban melakukan evaluasi dan memonitoring setiap bagian dan bidang dalam menyusun Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan



Tenaga Kerja Kota Singkawang sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

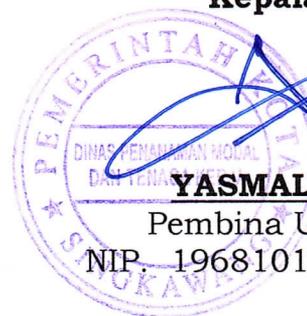
3. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih sesuai tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Perubahan RPD Kota Singkawang 2023 – 2026
4. Renja merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
5. Setiap bagian dan bidang dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan harus mampu melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasil pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan hasil (outcome) yang optimal yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan dan para investor.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan agar seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Singkawang,

2023

**Kepala Dinas,**



**YASMALIZAR, SH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681016 199803 1 004